

SEJARAH KESUKSESAN NABI MUHAMMAD SAW DALAM MEMIMPIN DAKWAH

¹Irfan Safrudin, ²Asep Ahmad Shiddiq, ³Ahmad Muttaqin

Universitas Islam Bandung

Corresponding Author : irfansafrudin@unisba.ac.id

Abstract

The Da'wah of the Prophet Muhammad was not only limited to spiritual and social aspects, but also included the fields of politics and government. This research aims to examine how the history of the Prophet Muhammad's success in leading da'wah, especially in the state. By using a descriptive qualitative method based on literature study, this research reveals that the Prophet Muhammad SAW successfully led da'wah in the state applying the principles of equality and togetherness, rejecting tyranny, maintaining law, providing religious freedom, and upholding the rule of law that had been established and agreed upon.

Keywords : Dakwah; Government; Prophet Muhammad.

Abstrak

Dakwah Nabi Muhammad SAW tidak hanya terbatas pada aspek spiritual dan sosial, tetapi juga mencakup bidang politik dan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sejarah kesuksesan Nabi Muhammad dalam memimpin dakwah khususnya dalam bernegara. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengungkap bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil memimpin dakwah dalam bernegara menerapkan prinsip-prinsip kesamaan dan kebersamaan, menolak tirani, memelihara hukum, memberikan kebebasan keagamaan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum yang telah ditetapkan serta disepakati.

Kata Kunci: Dakwah; Pemerintahan; Nabi Muhammad.

@ 2025 Hikmah : Irfan Safrudin, *et al.*

ARTIKEL INFO

Article history :

Submit : 13 Maret 2025

Revisi : 25 Maret 2025

Publish : 30 Maret 2025

Hikmah :

Jurnal Dakwah Dan Sosial

Volume 5, No. 1, Maret 2025,

Halaman : 51 - 65.



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

A. PENDAHULUAN

Kata Islam dipakai dalam tiga arti: agama, negara dan kultur. Islam sebagai agama adalah suatu sistem kepercayaan dan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, diwahyukan dalam al-Qur'an dan dilengkapi oleh hadits. Islam sebagai negara adalah kesatuan politik berdasarkan hukum al-Qur'an, dikembangkan oleh para pengganti Nabi Muhammad – *khulafa al-Rasyidin* – dan belakangan pecah dalam beberapa negara. Kultur Islam memperlihatkan, bahwa perpaduan peradaban tingkat tinggi, diperkaya dengan gaya Semit, Persia, Greko-Romawi dan lain sebagainya, dikembangkan pada masa daulah dan terutama yang lahir dengan perantaraan bahasa Arab.¹

Persoalan Islam sebagai suatu sistem ketatanegaraan, tidak terlepas dari berbagai persoalannya, seperti persoalan hubungan antara Islam dan negara/politik. Dalam ajarannya Islam tidak memisahkan antara persoalan duniawi dan ukhrawi, tetapi dalam prakteknya tidaklah sesederhana itu. Negara-negara yang mengatasnamakan Islam atau penduduknya mayoritas Islam mempunyai problem yang sama, mereka belum mampu merumuskan dengan jelas dan menyelesaikan persoalan hubungan antara agama dan negara. Bahkan persoalan itu menjadi fokus perdebatan dikalangan politisi dan

ceudekiawan Muslim. Contoh kasus seperti negara Pakistan, negara tersebut pada awalnya menyebut Republik Islam Pakistan dan menjadi Republik Pakistan kemudian kembali menjadi Republik Islam Pakistan. Tunisia, memberi prioritas pembangunan fisik dan mengabaikan pembangunan agama. Saudi Arabia, negara yang sedang menikmati pembangunan gedung-gedung bertingkat dan penerapan teknologi yang tinggi, dengan masyarakatnya yang kurang berpartisipasi dalam pembangunan negaranya tersebut yang umumnya dilakukan secara fisik oleh orang-orang asing.² Dilain pihak orang Islam belum mampu memberikan jawaban yang tepat dalam hubungannya antara Agama dan negara, sementara di pihak lain Kristen yang diwakili oleh Eropa telah dapat menyelesaikan persoalan hubungan antara agama dan negara, yaitu adanya pemisahan yang diametral antara negara dan gereja.³ Transformasi ini selesai menjelang akhir abad pertengahan dengan ditandai munculnya gerakan *Renaissance*.⁴

² Deliar Noer. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm. 2-3.

³ Dalam konteks sejarah Eropa setelah keruntuhan kerajaan Charlemagne munculnya sistem Feudal (The Feudal Sistem) yang dikembangkan oleh raja-raja Eropa dan gereja. Lihat Stewart C. Easton. *The Heritage of the Past From The Earliest Times to the Close of the Middle Ages*, (USA : Holt, Rinehart and Winston, 1963), hlm. 524-525 dan T. Walter Wallbank & Alastair M Taylor. *Civilization Past and Present*, (New York : Scott, Foresman and Company, 1949), hlm. 338-339.

⁴ "The Renaissance was one of the great periods of cultural and intellectual achievement in the West, artistic, and the philosophical flowering from the medieval to the modern world". Lihat Brinton dkk. *A*

¹ Philip K. Hitti. *Islam dan Barat*, terj. H.M.J. Irawan, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hlm. 3.

Islam sebagai agama yang mempunyai pandangan hidup yang konprehensif, sangat menentukan atau memberi peran yang signifikan terhadap perubahan sosial-politik baik untuk masyarakat muslim sendiri ataupun untuk masyarakat yang ada dibawah pengaruh doktrin Islam. Salah satunya sistem kekhifahan menentukan corak tersendiri dalam peta ketatanegaraan baik di dunia Islam ataupun di belahan dunia lain.

Persoalan lain lagi muncul yang tidak kalah pentingnya yaitu persoalan *khilafah*. Apakah bentuk negara dalam Islam harus berbentuk republik atau kerajaan? Jawaban terhadap persoalan ini tidaklah mudah sebab terkait dengan realitas sejarah yang menampilkan bentuk Negara dalam sejarahnya sangatlah beragam. Secara objektif, fakta sejarah menyatakan bahwa bentuk negara Islam yang terlama adalah kerajaan (*daulah/muluk*). Kemudian muncul pertanyaan yang cukup krusial, apakah bentuk kerajaan sebagai sebuah penghianatan terhadap konsep Islam dalam bernegara ?

Kajian terhadap masalah bentuk negara yang ideal dalam konsep Islam akan membawa konsekuensi logis untuk melihat catatan-catatan sejarah Islam yang membentang sejak Nabi Muhammad sampai sekarang. Tetapi

kajian ini terfokus untuk menganalisis sejarahnya pada masa Nabi Muhammad saw.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.⁵

Penelitian ini bertujuan untuuk menganalisis dan menggambarkan tentang sejarah keberhasilan dakwah nabi Muhammad saw dalam pemerintahan. Pendekatan penelitian ini adalah studi pustaka, yakni mengumpulkan informasi dari buku, artikel ilmiah atau dokumen sejarah yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Negara

Terbentuknya negara berawal dari perkumpulan orang perorang, mulai dari keluarga kemudian melebar menjadi keompok, suku dan suatu bangsa. Bahwa dalam bangsa tersebut terakumulasi sistem kelahiran, pemeliharaan, pemujaan, perlindungan menjadi satu kesatuan dalam sistem kehidupan. Penaklukan-penaklukan wilayah baik secara sukarela atau secara paksa lambat laun menjadi suatu federasi dan hal itu harus dipertahankan oleh suatu lembaga, dan lembaga itu dinamai “negara”. Itulah sebabnya

History of Civilization I, (New Jersey : Prentice-Hall, 1960), hlm. 439. dan Edward McNall Burns. *Western Civilization Their History and Their Culture*, (New York : W.W. Norton & Company, 1958), hlm. 419.

⁵ Arin Kharisma Dewi, “Fungsi Grup ICR Dakwah Facebook sebagai Sarana Dakwah”, *Hikmah: Dakwah dan Sosial*, Volume 4 No 2, 2024, hlm. 65.

suatu negara dimana-mana berdiri melalui proses berangsur-angsur (bertahap).⁶

Negara terdiri dari institusi-institusi formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam banyak hal negara adalah suatu perluasan dari keluarga, dan juga klen dan suku, yang dibangun untuk menjamin kesejahteraan minimal dan kehidupan yang baik bagi para anggotanya, dan demikian juga negara.⁷

Penjelasan yang sistematis mengenai negara berawal dari para filosof Yunani. Manusia, tegas Aristoteles, pada hakekatnya adalah makhluk politik (*Zoon Politicon*) sudah menjadi wataknya untuk hidup dalam suatu kota (polis) yang dengan begitu ia dapat mencapai watak moralnya yang tertinggi.⁸

Negara bagi Plato dan Aristoteles, adalah untuk tujuan mencari kebaikan umum dan kesempurnaan moral. Bagi keduanya, negara tidak hanya sekedar asosiasi politik, tetapi secara bersamaan berperan sebagai komunitas keagamaan dan agen sosialisasi – yang umumnya berurusan dengan pengembangan pikiran dan jiwa individu. Keduanya memandang individu sebagai makhluk yang secara alami cenderung kepada kebaikan dan karenanya, penekanannya pada dimensi moral

manusia. Keduanya menekankan rasa komunitas yang ditemukan dalam kota (*polis*), yakni kesepakatan umum tentang keyakinan-keyakinan moral.⁹

Negara, sebagian, terdiri dari lembaga-lembaga yang memerintah, tetapi “negara” dan “Pemerintah” tidaklah sinonim. Negara adalah suatu gagasan yang ada sepanjang masa, begitupun ciri-cirinya diambil dari sejarah pemerintahan yang telah berlangsung lama, masing-masing ditandai oleh rangkaian krisis dan keberhasilannya. Pemerintah terdiri dari orang-orang tertentu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pada waktu tertentu dalam sejarah.¹⁰ Hakekat negara, dengan ini dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya.¹¹

Jadi negara adalah semacam bentuk ikatan antar manusia, semacam bentuk kumpulan yang pada akhirnya dapat memepergunakan paksaan terhadap anggota-anggotanya. Bentuk ikatan ini pada umumnya ada dua macam; pertama, yang meliputi keseluruhan segi hidup manusia, dan kedua,

⁶ Kranenburg & Tk.B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), hlm. 12.

⁷ Rodee (ed.) dkk. *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Rajawali, 2000), hlm. 46.

⁸ Frederick Copleston. *A History of Philosophy*, (London : Search Press, 1946), hlm. 352. Sjachran Basah. *Ilmu Negara Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 114-115.

⁹ Abdul Rashid Moten. *Ilmu Politik Islam*, terj. Munir A. Mu'in & Widyawati, (Bandung : Pustaka, 2001), hlm. 101.

¹⁰ Ibid., hlm. 46.

¹¹ Soehino. *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 147.

yang meliputi hanya sebagian dari segi-segi hidup itu.¹²

Ciri Pokok suatu negara adanya :

- a. Pemerintah yang menjalankan tugas mengatur negara.
- b. Wilayah kekuasaan yang meliputi luas wilayah dan geografis.
- c. Rakyat sebagai warga negara yang diatur oleh negara yang meliputi jumlah dan karakteristik rakyat.
- d. Identitas Nasional memberikan ciri terhadap suatu negara.¹³

2. Monarki dan Republik

Para sarjana dalam mengadakan klasifikasi bentuk-bentuk negara mempergunakan kriteria atau ukuran yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya bertemu pada dua sistem bentuk negara yaitu: bentuk kerajaan (monarki) dan republik. Di dalam mengemukakan perbedaan antara monarki dengan republik, meminjam istilah Jellinek, mempergunakan kriteria suatu pertanyaan tentang bagaimanakah cara terbentuknya kemauan negara.

Jellinek memberi argumentasi bahwa negara itu dianggap sebagai suatu kesatuan

yang mempunyai dasar-dasar hidup, dan dengan demikian negara itu mempunyai kehendak atau kemauan. Kemauan negara itu sifatnya abstrak, sedangkan dalam bentuknya yang kongkrit kemauan negara itu menjelma sebagai hukum atau undang-undang. Jadi undang-undang atau peraturan-peraturan itu adalah merupakan perwujudan atau penjelmaan daripada kemauan negara.¹⁴

Menurut Jellinek ada dua macam cara mengenai terbentuknya kemauan negara itu.

Pertama, kemauan negara itu terbentuk atau tersusun di dalam jiwa seseorang yang mempunyai ujud atau bentuk fisik. Artinya kemauan negara itu hanya ditentukan oleh satu orang tunggal, tiada orang atau badan lain yang dapat ikut campur dalam pembentukan kehendak negara itu, kemauan negara yang terbentuk secara demikian ini disebut kemauan fisik, dan negara yang mempunyai kemauan fisik itu disebut monarki. Jadi tegasnya, di dalam monarki ini undang-undang negara itu hanya ditentukan atau dibuat oleh satu orang tunggal.

Kedua, kemauan negara itu terbentuk atau tersusun di dalam suatu dewan. Dewan itu adalah suatu pengertian yang adanya hanya di dalam hukum, dan sifatnya abstrak, serta berbentuk yuridis. Memang sebenarnya anggota-anggota daripada dewan itu, yaitu orang, masing-masing adalah merupakan kenyataan dan mempunyai bentuk fisik, tetapi

¹² Deliar Noer. *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 62.

¹³ Soehino. *Ilmu.....*, hlm. 37-43. negara sebagai institusi adalah : 1. yang mempunyai legitimasi dalam menggunakan kekuatan, 2. Yang bisa menentukan antara warga negara dan bukan warga negara serta yang mengontrol keluar-masuk warga dalam teritorialnya, 3. Membuat ideologi bagi warga negaranya. Lihat Patrick Dunleavy. "The State", dalam Robert E. Goddin & Philip Pettit. *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, (Oxford : Blackwell Publishers, 1996), hlm. 611.

¹⁴ Soehino. *Ilmu... , h.*, 174. dan Kranenburg & Tk.B. Sabaroedin, *Ilmu Negara.....*, hlm. 79-80.

dewannya itu sendiri adalah merupakan kenyataan yuridis, karena dewan itu adalah merupakan konstruksi hukum, jadi yang ada itu justru sebagai akibat ditetapkan oleh peraturan hukum, di mana beberapa orang merupakan suatu kesatuan, dan dianggap sebagai suatu person. Kehendak atau kemauan yang terbentuk atau tersusun secara demikian ini disebut kemauan yuridis, dan negara yang memiliki kemauan yuridis ini disebut Republik.¹⁵

Sistem monarki digambarkan dalam al-Qur'an serta dengan gaya dan pola yang berbeda. Tiga contoh yang menonjol adalah kerajaan Talut, Daud dan Sulaiman. Kisah ini dengan jelas diterangkan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Setelah wafatnya Nabi Musa, para pemimpin orang-orang Israel berkuasa secara bersama-sama, lebih menyerupai sebuah dewan. Tetapi, mereka dianggap lemah oleh musuh-musuh mereka dan dirasakan bahwa kepemimpinan mereka harus bersatu, khususnya apabila mereka hendak mempertahankan diri.¹⁶ Sehingga lahir lah kerajaan yang dipimpin oleh raja Talut,¹⁷ Nabi

Daud,¹⁸ dan Nabi Sulaiman.¹⁹ Al-Qur'an juga menceritakan tentang kerajaan dan raja-raja yang *dholim* dalam personifikasi Ratu Bilqis (ratu yang memerintah suatu negeri yang sezaman dengan Nabi Sulaiman) dan Namrud²⁰ (Raja yang memerintah pada masa

jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim" dan "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah 2 : 251: "Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam."

¹⁹ Q.S. Shaad 38 : 35 : "Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi".

²⁰ Q.S. Al-Baqarah 2 : 258 : "Apakah kamu tidak memperhatikan orang[163] yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zali".

¹⁵ Soehino. *Ilmu...*, hlm. 175. dan Kranenburg & Tk.B. Sabaroedin, *Ilmu Negara.....*, hlm. 81.

¹⁶ Abdulrahman Abdulkadir Kurdi. *Tatanan Sosial Islam*, terj. Ilzamuddin Ma'mur ,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h., 29. Lihat proses terpilihnya Talut menjadi raja dalam al- Qur'an; al-Baqarah 2 : 246-247.

¹⁷ Lihat proses terpilihnya Talut menjadi raja dalam al-Qur'an; al-Baqarah 2 :246 & 247: "Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali

Nabi Ibrahim) serta Fir'aun²¹ (Raja yang memerintah pada zaman nabi Musa).

3. Pemerintahan Islam pada Zaman Nabi Muhammad

Pada waktu Nabi hijrah ke Madinah,²² maka peran Nabi bertambah bukan saja sebagai Rasul saja tetapi Nabi berperan juga sebagai kepala pemerintahan dan negara.²³ Hal ini bisa dilihat dari perubahan strategi Nabi dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Apabila di Mekkah sosialisasi Islam mempunyai perbedaan yang tegas antara

orang Kafir Arab-Quraisy dengan orang Muslim, seperti tidak adanya kompromi, perannya sebagai penyampai wahyu dan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan konsep tauhid, sedangkan di Madinah Nabi berhadapan dengan masyarakat yang plural, sehingga masalah yang paling dominan adalah persoalan interaksi antara masyarakat Madinah. Maka muncullah kesepakatan-kesepakatan diantara masyarakat Madinah.

Beberapa bulan setelah tiba di Madinah, Nabi menyusun konstitusi tertulis yang memberikan dasar bagi pemerintahan Muslim yang baru berdiri. Konstitusi tersebut membangun kembali tatanan politik di Madinah, menurut konsepsi Islam, mengenai umat,

- a. Mengakui Nabi sebagai kepala persemaikmuran baru;
- b. Menentukan perannya untuk mempertahankan kedamaian dan tatanan;
- c. Menghakimi (menengahi) kelompok-kelompok yang konflik;
- d. memberikan keamanan dari serangan luar.²⁴

Dokumen tersebut – yang terkenal dengan sebutan piagam Madinah²⁵ menegaskan prinsip-prinsip kesamaan, menolak tirani dan sama-sama memelihara

²¹ Q.S. Al-Qashshas 28 : 36-38 : " Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan (membawa) mukjizat- mukjizat Kami yang nyata, mereka berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek moyang kami dahulu"; "Musa menjawab: "Tuhanmu lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim"; Dan berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat[1124] kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta"... dan Az- Zukhruf 43 : 43-54. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah kami buatlah bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya".

²² Hampir seluruh sejarawan sependapat bahwa Nabi sampai di Quba pada hari senin tanggal 8 Rabiul Awwal 1H/ 20 September 622 M. Di sini ia tinggal beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanannya ke Madinah pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awwal / 24 September 622 M. Lihat Majid Ali Khan. *Muhammad Rasul terakhir*, terj. Fathul Umam,(Bandung : Pustaka, 1985) hlm. 88 A. Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Mukhtar Yahya, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 113.

²³ Lihat Muhammad Azat Darajat. *Sirat al-Rasul*, (TK : Isya al-babi al-Halabi, 1965), hlm. 17 dan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqhu al-Sirah*, (Beirut : Darul Fikr , 1980), hlm. 177-178.

²⁴ Abdul Rashid Moten. *Ilmu Politik* , hlm. 110.

²⁵ Muhammad Husain Haekal. *Sejarah Hidup Muhammad*, terj., Ali Audah, (Jakarta : Tintamas, 1984) hlm. 221-225.

hukum. Orang-orang Yahudi diintegrasikan ke dalam badan politik tanpa mencabut kebebasan keagamaan mereka. Nabi mengatur hubungan-hubungan sosial, membuat hukum berdasarkan al-Quran dan melaksanakannya, mengangkat pasukan dan memimpin mereka dan ketika wilayahnya meluas, ia mengatur melalui musyawarah dengan para sahabatnya. Kenyataannya, semua masalah penting, yang tidak terungkap oleh wahyu, ditetapkan oleh Nabi melalui proses musyawarah.²⁶ Negara persemakmuran yang dibentuk oleh Nabi menjunjung tinggi supremasi hukum yang telah ditetapkan serta disepakati.

4. Antara Kepemimpinan dan Kemukjizatan dalam Kesuksesan

Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Nabi Saw., berlangsung bukan tanpa hambatan, Nabi menghadapi hambatan bukan saja bersifat mental, tetapi juga bersifat fisik. Nabi diejek, dicemoohkan, dihina dan disakiti. Kalau orang-orang Quraisy tidak merasa cukup dengan mengejek dan memperolok-olokannya, bahkan diteruskan untuk memerangi Nabi dan para pengikutnya dengan kekuatan senjata.

Kekhawatiran orang Quraisy yaitu khawatir kalau struktur masyarakat mereka sendiri dan kepentingan-kepentingan dagang mereka, akan tergoyahkan langsung oleh ajaran Nabi yang menekankan keadilan sosial

yang makin lama menjurus dalam kutukannya terhadap riba, dan desakannya mengenai zakat.

Kepemimpinan Rasulullah selaku seorang pemimpin mendamaikan suku-suku yang terpecah belah menjadi satu masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta berprestasi dengan gemilang, bukan karena mukjizat dan menggunakan jalan-jalan yang luar biasa. Memang betul dalam perang Badar kaum Muslimin mampu mengalahkan kaum Quraisy Jahili yang berkekuatan tiga kali lipat, akan tetapi kemenangan itu bukan karena suatu mukjizat Nabi. Namun lebih banyak karena kepemimpinan Nabi yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain memperoleh bantuan Allah Swt.

Pada titik ini memang layak dimunculkan pertanyaan dimana letak kunci kesuksesan kepemimpinan Rasulullah selain memang karena petunjuk, bantuan dan perlindungan Allah Swt, ada beberapa argumentasi yang dapat dirumuskan antara lain:

Pertama, akhlak Nabi yang terpuji tanpa cela. Nabi sejak muda – sebelum diangkat menjadi Rasul – terkenal lembah lembut namun penuh daya vitalis, berakhlak mulia, jujur dan tidak mementingkan diri sendiri atau sukunya.

Kedua, karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana dan bersemangat

²⁶ Ibid.

baja. Rasulullah walaupun sejak dilahirkan sudah dalam keadaan yatim dan terlahir dari kalangan suku yang terkemuka dan cucu dari pemimpin suku, namun tidak mau hidup pada belas kasih orang lain. Sejak kecil Nabi ikut mengembalakan ternak keluarga dan pada usia dua belas tahun ikut membantu pamannya berdagang, mengembara ke Syria, satu perjalanan yang sulit dan tidak akan surut dalam perjuangan. Selain itu pengalaman hidupnya penuh perjuangan itu telah membuat dirinya matang dan mengenal liku-liku kehidupan seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, sistem dakwah Nabi yang menggunakan metode imbauan yang diwarnai oleh hikmah bijaksana.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Al-An’an 16:125)

Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang *bathil*.

Nabi dalam menyeru manusia agar beriman, berbuat yang patut dan mencegah kemungkaran sedikitpun tidak ada unsur pemaksaan.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”. QS. Al-Baqarah 2 : 256

Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah Swt.

Ketika *futuh* Makkah, Nabi tidak mengambil tindakan atau balasan apa apa terhadap orang-orang yang pernah mencemoohkan dan mengejeknya serta mengusirnya.

Keempat, perjuangan Nabi yang jelas menuju kearah menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemuliaan duniawi. Nabi menolak tawaran-tawaran pemuka Quraisy untuk menukar gerak perjuangannya. Ketika Nabi telah menjadi pemimpin umat yang mempunyai kekuasaan, Nabi tidak menggunakan harta *baitul mal* untuk memupuk kekayaan, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Selain itu, Nabi juga tidak bersikap nepotis dan berusaha membentuk dinasti. Sikap pengorbanan yang tanpa pamrih ini melahirkan keyakinan di kalangan pengikut akan kebenaran dan kejujuran cita-cita perjuangan yang diembannya.

Kelima, prinsip persamaan. Nabi dalam bergaul bersikap sama terhadap semua orang. Tegur sapaanya, lemah lembutnya, senyum manisnya tidak berbeda antara yang lemah dan yang lain. Nabi tidak pernah menghardik yang bersifat menghina.

Keenam, prinsip kebersamaan, Nabi dalam menggerakkan orang berbuat tidak hanya sekedar memberikan perintah. Nabi sendiri ikut terjun memberikan contoh, seperti dalam membangun mesjid Quba dan ikut tarjum dalam peperangan.

Ketujuh, mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut, seperti Nabi memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Abbesyinia, sedangkan Nabi tetap di Mekkah.

Kedelapan, memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat serta pendelegasian wewenang. Nabi bukan tipe pemimpin yang otokratis dan militeristis. Selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah swt. maka wewenangnya selaku pemimpin umat dan Negara ada sebagian yang didelegasikan kepada pejabat dibawahnya.

Kesembilan, tipe kepemimpinan kharismatik dan demokratis. Kharismanya tiada tanding, hal ini dapat ditunjukkan dengan ketaatan para sahabatnya mereka bukan karena takut dan terpaksa tetapi atas dasar kerelaan, taat bukan karena ada Nabi tidak adapun para sahabat tetap taat dan patuh.

Sifat demokratis ini dapat ditunjukkan dengan sikap untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, sikap terbuka atas kritik terhadap dirinya. Sikap demokratis Nabi dapat diperlihatkan pula oleh ketekunan beliau mendidik para sahabat untuk dipersiapkan sebagai calon-calon penggantinya selaku

pemimpin umat dalam urusan duniawinya dan membiarkan mereka mengembangkan diri tanpa kekhawatiran tersaingi.

5. Peran Nabi Muhammad dalam Kehidupan

Peran Nabi dalam kehidupan, hal ini dapat diuraikan dalam berbagai sisi dan aspek kehidupan, seperti antara lain :

Pertama, sebagai tokoh revolusioner, biasanya seorang tokoh revolusioner adalah membawa satu situasi (perubahan) ke situasi yang baru, sedangkan Nabi melakukan perubahan dalam berbagai hal baik idiologi, ekonomi, sistem ketatanegaraan, pendidikan dan sosial. Dalam hal perubahan idiologi masyarakat, Nabi merubah masyarakat yang *politheisme* dengan sistem *paganism* menjadi masyarakat yang *monotheisme* yang dilandasi *tauhidullah*.

Kedua, sebagai tokoh agama, dengan memproklamirkan sebagai Nabi dan Rasul maka pada saat itu Nabi memimpin umat kejalan yang lurus berdasarkan wahyu yang didapatkannya, peristiwa pengangkatan ini setelah Nabi melakukan *tahanuts* (mengasingkan diri) di gua Hira, maka kedatangan malaikat Jibril di Gua Hira dengan membawa surat al-Alaq, ayat ini belum menyuruh Nabi menyeru manusia kepada suatu agama, dan belum pula memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah utusan Allah, akan tetapi ayat-ayat itu mengesankan sesuatu yang luar biasa, yang belum diketahui oleh

Nabi sebelumnya. Baru setelah menerima surat al-Mudatsir, pernyataan Muhammad sebagai Nabi lebih jelas karena ada perintah untuk menyeru manusia.

Ketiga, tokoh pedagang, Muhammad sejak muda sering berdagang dan hal ini pernah dilakukan pada usia 12 tahun ikut pamannya berniaga ke negeri Syam, dan setelah dewasa kegiatan berdagang ini terus dilakukan sampai Nabi terkenal karena kejujurannya dalam setiap transaksi. Pernah suatu kali terjadi karena Nabi selalu menepati janji, yaitu Muhammad selama tiga hari menggu seseorang di pojok jalan, yakni Abdullah bin Abi al-Hinsa, yang berjanji untuk segera kembali. Ketika orang itu lewat jalan tersebut di hari keempat, Muhammad tidak marah malah beliau berkata: *“Saya telah berada disini selama tiga hari menepati ucapanku”*, Abdullah menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya.

Keempat, sebagai tokoh sosial, secara konsisten Nabi mengajarkan bahwa suku Quraisy harus menata rumahnya sendiri. Perolehan harta secara berlebih-lebihan, perampasan hak orang-orang yang lemah dan pengabaian nasib orang-orang miskin di Mekkah, semuanya itu adalah kejahatan. Pemecahan bagi saudara-saudaranya sesama Quraisy adalah memelihara sanak saudara keluarga yang miskin, memperhatikan kehidupan anak-anak yatim mereka dan bersedia menolong orang-orang miskin di

kalangan mereka. Kerjasama antara yang kaya dengan yang miskin ini adalah ajaran pokok Nabi Muhammad, serta menghilangkan sistem perbudakan yang sudah menjadi tradisi secara politik sosial dan ekonomi di masyarakat Quraisy. Nabi juga menyerukan penghormatan terhadap perempuan yang pada saat itu kedudukan dan posisinya sangat rendah bahkan cenderung menjadi objek laku-laki. Nabi juga menghapuskan sistem waris yang telah dijadikan dasar di kalangan Quraisy dan sistem adopsi anak yang memposisikan anak adopsi sama dengan anak-anak sendirinya.

Kelima, tokoh politik dan pemimpin Negara, hijrahnya Nabi ke Madinah mengubah peran Nabi bukan hanya sebagai Rasul saja tetapi sebagai seorang pemimpin masyarakat Arab dan Yahudi di Madinah serta sebagai kepala Negara. Oleh karena itu dakwah dilakukan tidak hanya menyeru orang perorang sebagaimana telah dilakukan di Mekkah tetapi menerukan terhadap kaum perkaum dengan tujuan terbentuknya masyarakat bernegara dengan diikat oleh sebuah konstitusi yang telah disepakati oleh tiga komponen masyarakat, yaitu Arab-Muslim, Arab non-Muslim dan suku Yahudi, konstitusi itu yang terkenal dengan nama Piagam Madinah. Di Madinah Nabi memproklamasikan sistem politik baru dan memulainya sistem sosial dan budaya yang baru.

Pada waktu Nabi hijrah ke Madinah,²⁷ maka peran Nabi bertambah bukan saja sebagai Rasul saja tetapi Nabi berperan juga sebagai kepala pemerintahan dan negara.²⁸ Hal ini bisa dilihat dari perubahan strategi Nabi dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Apabila di Mekkah sosialisasi Islam mempunyai perbedaan yang tegas antara orang Kafir Arab-Quraisy dengan orang Muslim, seperti tidak adanya kompromi, perannya sebagai penyampai wahyu dan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan konsep tauhid, sedangkan di Madinah Nabi berhadapan dengan masyarakat yang plural, sehingga masalah yang paling dominan adalah persoalan interaksi antara masyarakat Madinahal., Maka muncullah kesepakatan-kesepakatan diantara masyarakat Madinah.

Beberapa bulan setelah tiba di Madinah, Nabi menyusun konstitusi tertulis yang memberikan dasar bagi pemerintahan Muslim yang baru berdiri. Konstitusi tersebut membangun kembali tatanan politik di Madinah, menurut konsepsi Islam, mengenai umat,

²⁷ Hampir seluruh sejarawan sependapat bahwa Nabi sampai di Quba pada hari senin tanggal 8 Rabiul Awwal 1H/ 20 September 622 M. Di sini ia tinggal beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanannya ke Madinah pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awwal / 24 September 622 M. Lihat Majid Ali Khan. *Muhammad Rasul terakhir*, terj. Fathul Umam, (Bandung : Pustaka, 1985) hlm. 88 A. Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Mukhtar Yahya, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 113.

²⁸ Lihat Muhammad Azat Darajat. *Sirat al-Rasul*, (TK : Isya al-babi al-Halabi, 1965). , hal., 17 dan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqhu al-Sirah*, (Beirut : Darul Fikr , 1980), hlm. 177- 178.

- a. Mengakui Nabi sebagai kepala persemajukan baru,
- b. Menentukan perannya untuk mempertahankan kedamaian dan tatanan
- c. Menghakimi (menengahi) kelompok-kelompok yang konflik
- d. memberikan keamanan dari serangan luar.²⁹

Dokumen tersebut—yang terkenal dengan sebutan piagam Madinah³⁰ - menegaskan prinsip-prinsip kesamaan, menolak tirani dan sama-sama memelihara hukum. Orang-orang Yahudi diintegrasikan ke dalam badan politik tanpa mencabut kebebasan keagamaan mereka. Nabi mengatur hubungan-hubungan sosial, membuat hukum berdasarkan al-Quran dan melaksanakannya, mengangkat pasukan dan memimpin mereka dan ketika wilayahnya meluas, ia mengatur melalui musyawarah dengan para sahabatnya. Kenyataannya, semua masalah penting, yang tak terungkap oleh wahyu, ditetapkan oleh Nabi melalui proses musyawarah.³¹ Negara persemajukan yang dibentuk oleh Nabi menjunjung tinggi supremasi hukum yang telah ditetapkan serta disepakati.

D. KESIMPULAN

Nabi Muhammad saw berhasil dalam memimpin dakwahnya dalam berbagai aspek

²⁹ Abdul Rashid Moten. Ilmu Politik, hlm. 110.

³⁰ Muhammad Husain Haekal. *Sejarah Hidup Muhammad*, terj., Ali Audah, (Jakarta : Tintamas, 1984) hlm. 221-225.

³¹ Ibid.

kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Peran Nabi dalam kehidupan adalah sebagai tokoh revolusioner; sebagai tokoh agama; tokoh pedagang; sebagai tokoh sosial; tokoh politik dan pemimpin Negara. Nabi Muhammad berhasil membangun negara Madinah dengan prinsip-prinsip kesamaan, menolak tirani dan sama-sama memelihara hukum. Orang-orang Yahudi diintegrasikan ke dalam badan politik tanpa mencabut kebebasan keagamaan mereka. Nabi menjunjung tinggi supremasi hukum yang telah ditetapkan serta disepakati.

Letak kunci kesuksesan kepemimpinan Rasulullah selain memang karena petunjuk, bantuan dan perlindungan Allah Swt, tetapi juga karena; akhlak Nabi yang terpuji tanpa cela; karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana dan bersemangat baja; sistem dakwah Nabi yang menggunakan metode imbauan yang diwarnai oleh hikmah bijaksana; perjuangan Nabi yang jelas menuju kearah menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemuliaan duniawi, prinsip persamaan; prinsip kebersamaan; mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut; memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat serta pendelegasian wewenang; tipe kepemimpinan kharismatik dan demokratis.

E. REFERENCES

- Arnold, Sir Thomas W. *The Caliphate*, London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1967.
- Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *al-Fiqhu al-Sirah*, Beirut : Darul Fikr , 1980
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1993.
- Copleston, Frederick. *A History of Philosophy*, London : Search Press, 1946
- Dunleavy. "The State", dalam Robert E. Goddin & Philip Pettit. *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Oxford : Blackwell Publishers, 1996.
- Deliar Noer. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Demombynes, Maurice Gaudefroy. *Muslim Insitution*, London : george Allen & Unwin Ltd, 1968.
- Darajat, Muhammad Azat. *Sirat al-Rasul*, Isya al-babi al-Halabi, 1965.
- Easton, Stewart C. *The Heritage of the Past From The Earliest Times to the Close of the Middle Ages*, USA : Holt, Rinehart and Winston, 1963.
- Hassan Ibrahim Hassan. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Humam, Yogyakarta : Kota Kembang, 1989.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, terj., Ali Audah, Jakarta : Tintamas, 1984.

- Hitti, Philip K. *Islam dan Barat*, terj. H.M.J. Irawan, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization I*, USA : The University of Chicago Press, 1977.
- Irfan Safrudin. “*Sejarah proses lahirnya Mazhab Fiqih analisis Sosio-Kultural*”. Makalah , Bandungn: Fak. Ushuluddin-Unisba, 2001.
- Jabiri, Muhammad Abid Al-. *Agama, Negara dan Penerapan Syari’ah*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2001.
- , Muhammad Abid al- Al-Aql al-Siyasi al-Arabi, Beirut : Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah, 1990
- Kim, Jaegwon & Ernest Sosa. *A Companion to Metaphysics*, USA: Massachusetts, 1997. Kurdi, Abdulrahman Abdulkadir. *Tatanan Sosial Islam*, terj. Ilzamuddin Ma’mur, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Khan, Majid Ali. *Muhammad SAW Rasul Terakhir*, terj. Fathul Umam, Bandung : Pustaka, 1985.
- Kranenburg & Tk.B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Martin, Richard C. *Islam A Cultural Perspective*, New Jersey : Prentice hall, 1982.
- Moten, Abdul Rashid. *Ilmu Politik Islam*, terj. Munir A. Mu’in & Widyawati, Bandung : Pustaka, 2001
- Marogi, Ahmad Mustafa. *al-Tafsir al-Marogi*, IV, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI-Press, 1990.
- Rodee (ed.) dkk. *Pengantar Ilmu Politik*, terj. Zulkifli Hamid Jakarta : Rajawali, 2000
- Singer, Peter . *A Companion to Ethics*, USA : Massachusetts,1997.
- Shiddiqi, Nourrouzaman. *Tamaddun Muslim Bunga Rampai Kebudayaan Musilm*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- -. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Shaban, M.A. *Sejarah Islam Penafsiran Baru 600-750*, terj. Machnun Husein, Jakarta : Rajawali Press, 1993.
- Sharqawi, Effat Al-. *Filsafat Kebudayaan Islam*, terj. Ahmad Rofi Usmani, Bandung : Pustaka, 1996.
- Sjachran Basah. *Ilmu negara Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Soehino. *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Mukhtar Yahya, Jakarta : Pustaka al- Husna, 1983.
- Watt, W. Montgomery. *Kejayaan Islam kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj.

Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1990.

Wallbank, T. Walter & Alastair M Taylor.
Civilization Past and Present, New
York: Scott, Foresman and Company,
1949.

Zaydans, Jurji . *Umayyads and Abbasids*, New
Delhi : Kitab Bhavan, 1978.